

BAB IV PENUTUP

4.1.Kesimpulan

4.1.1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Jambi, ditemukan bahwa tahap kolaborasi telah melibatkan dialog tatap muka secara langsung di antara para pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota serta dalam forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Interaksi langsung ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan kolaborasi yang efektif. Pelaksanaan dialog tatap muka berjalan dengan baik, menghasilkan kesepakatan bersama yang mencerminkan kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan. Selain itu, pemahaman bersama mengenai visi, misi, tujuan, serta informasi terkait kolaborasi telah terjalin dengan baik, yang turut mendukung efektivitas proses kolaborasi dalam pengelolaan RTH Publik.

Hasil akhir dari kolaborasi ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya program RTH Publik, yang telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas taman-taman kota dan RTH lainnya di Kota Jambi. Perawatan dan pemanfaatan ruang-ruang hijau tersebut telah sesuai dengan fungsinya sebagai RTH Publik. Selain itu, keberhasilan dalam pengelolaan RTH Publik juga mendapat pengakuan dari pemerintah, yang ditunjukkan dengan keberhasilan kota ini dalam memperoleh penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam penilaian penghargaan tersebut, RTH Publik menjadi salah satu indikator dengan

kontribusi nilai tertinggi, yaitu mencapai nilai 90, yang menegaskan keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah tersebut.

4.1.2. Faktor penghambat dalam proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Jambi yaitu adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan lahan, dan fungsi estetika yang belum optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat utama. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pentingnya fungsi RTH publik berdampak negatif terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang ada.

4.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan efektivitas proses *collaborative governance* dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Jambi diantaranya. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam mengkaji konsep *collaborative governance*. Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah belum diterapkannya metode kuantitatif untuk memperoleh hasil yang lebih terukur. Maka dari itu untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti dengan menggunakan metode kuantitatif. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ruang terbuka hijau Publik, disarankan agar Dinas Lingkungan Hidup melakukan

upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran publik melalui program sosialisasi dan edukasi, serta menciptakan forum komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perlunya penguatan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung preservasi ruang terbuka hijau sangat penting.

Selain itu, meskipun proses kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor telah berjalan dengan baik, implementasinya masih belum optimal. Saat ini, kolaborasi masih bersifat semi-formal, yang ditandai dengan belum adanya kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kota Jambi dan pihak swasta yaitu dalam bentuk MOU. Regulasi yang berlaku masih bersifat internal bagi masing-masing instansi dan belum memiliki daya ikat yang kuat secara menyeluruh. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kolaborasi tetap dapat berlangsung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi kerja sama agar memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses kolaborasi.

Bagi masyarakat sebagai pengunjung taman dan RTH Publik, penting untuk menjaga kebersihan serta fasilitas yang tersedia, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan taman-taman dan RTH Publik di Kota Jambi. Selanjutnya untuk Pemerintah dalam kolaborasi perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan keberadaan fungsi RTH Publik dengan Mengedukasi masyarakat atau membuat sosialisasi tentang manfaat lingkungan dan sosial dari RTH Publik bisa meningkatkan partisipasi dan kepatuhan terhadap pengelolaannya.